



## **BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 50 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang: a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah, maka untuk pengendalian inflasi tersebut perlu dilakukan langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor real serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat di Kabupaten Samosir, maka perlu upaya peningkatan koordinasi dengan seluruh instansi terkait lingkup Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1999);
  3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.....

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir, dengan susunan Tim dan Pedoman Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Ruang Lingkup tugas dan kewajiban Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok;
  2. Mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok;
  3. Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat;
  4. Mengelola dampak dari penyesuaian, harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, harga *liquefied petroleum gas*, upah minimum (UMP/UMR), bea balik nama kendaraan bermotor, cukai rokok, tarif tol, tarif pelabuhan dan tarif angkutan;
  5. Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga bahan pokok yang kredibel, terkini dan mudah diakses oleh masyarakat;
  6. Melakukan koordinasi yang intensif diantaranya Perangkat Daerah (PD) dalam satu wilayah dan kerjasama dengan Perangkat Daerah (PD) di wilayah lainnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara Lainnya di daerah, serta berbagai pihak terkait untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan pokok;

KETIGA.....

**KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah:

1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
2. Memantau dan mengevaluasi atau efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang-barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah (PD) terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
5. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
6. Melakukan inventarisasi data dan Informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;
7. Mengidentifikasi dan menganalisa Permasalahan Perekonomian Daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
8. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan pengangguran serta upah minimum di daerah;
9. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
10. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah di akses masyarakat;
11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah Tim Pengendalian inflasi Daerah serta rapat koordinasi Nasional TPID;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap enam bulan sekali yang memuat:
  - a. Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
  - b. Identifikasi dan Analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
  - c. Rumusan rekomendasi kebijakan;
  - d. Pelaksanaan kebijakan;
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan;
  - f. Rencana program kerja tahun berikutnya.
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Gubernur Sumatera Utara setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.

**KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh Penginput Data *website* yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir.

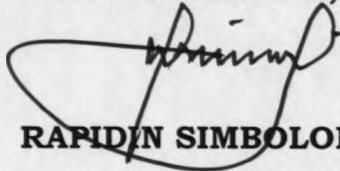
**KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM .....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 26 Februari 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 50 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 26 FEBRUARI 2019**

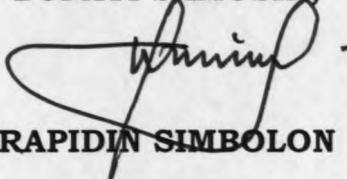
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI DAERAH TAHUN 2019  
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

---

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2019 TINGKAT  
KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Ketua : Bupati Samosir.  
Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati Samosir;  
2. Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Sibolga.
- II. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;  
Wakil Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir.
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Samosir;  
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;  
6. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Samosir;  
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Samosir;  
8. Kepala Badan Statistik Kabupaten Samosir;  
9. Kepala Perum Bulog Divre II Pematang Siantar;  
10. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Samosir;  
11. PT. Bank BRI Cabang Pangururan;  
12. PT. Bank SUMUT Cabang Pangururan;  
13. PT. Bank Mandiri Cabang Pangururan;  
14. PT. Bank BNI Cabang Pangururan.
- IV. Tim Sekretariat  
Koordinator : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sumber Daya Alam Setdakab  
Samosir.  
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perekonomian Daerah Setdakab.  
Samosir;  
2. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Setdakab.  
Samosir;  
3. Mesra Sitanggang, SP (Staf Bagian Perekonomian  
Setdakab. Samosir);  
4. Risnawati Pakpahan, SE (Staf Bagian Perekonomian  
Setdakab. Samosir);  
5. Monal R.H. Sihaloho, SE (Staf Bagian Perekonomian  
Setdakab Samosir);  
6. Dani Sitohang (Staf Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan Setdakab. Samosir);  
7. Yanra Silalahi (Staf Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan Setdakab. Samosir);

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 50 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 26 FEBRUARI 2019**

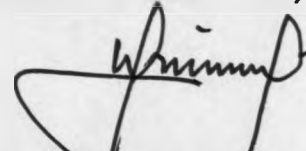
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI DAERAH TAHUN 2019  
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR.**

---

**PEDOMAN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2019  
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

1. Pelaksanaan Pertemuan/Rapat TPID Kabupaten Samosir:
  - a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaksanakan Pertemuan/Rapat pada bulan ke- Dua dalam minggu pertama selama Empat Triwulan dipimpin oleh Ketua TPID;
  - b. Apabila Anggota TPID tidak dapat menghadiri Pertemuan/Rapat, maka anggota TPID yang bersangkutan wajib menunjuk pengganti yang berkompeten;
  - c. Dalam pelaksanaan Pertemuan/Rapat materi pembahasan adalah laporan Perkembangan Inflasi, Faktor Penyebab Inflasi, Strategi Pengendalian Inflasi, Rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati Samosir dan siaran Pers Kepada Publik.
  - d. Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota;
  - e. Rekomendasi kebijakan pada setiap Rapat TPID wajib ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang;
  - f. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional dan pengendalian Inflasi pada Tingkat Provinsi;
  - g. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten/Kota;
  - h. Melakukan Rapat koordinasi dan kerja sama antar OPD/Kecamatan minimal satu kali setiap semester;
  - i. Melakukan kunjungan pasar sentra produksi dalam rangka menjaga keterjangkauan barang dan jasa;
  - j. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan seperti; memangkas rantai produksi dan rantai distribusi pertanian, sertifikasi lahan pertanian, peningkatan infrastruktur Jalan Usaha Tani (JUT).
2. Pelaksanaan Pertemuan/Rapat Sekretariat TPID Kabupaten Samosir:
  - a. Tim Sekretariat TPID bertanggungjawab mempersiapkan undangan materi pertemuan, risalah rapat laporan tahunan, surat rekomendasi kepada Bupati Samosir dan siaran pers pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi;
  - b. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota.
3. Narasumber yang dapat di undang oleh TPID Kabupaten Samosir dan Tim Koordinasi TPID antara lain:
  - a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;
  - b. Dunia Usaha.

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**